

MODERASI BERAGAMA DAN PANCASILA:

Pilar Kebhinekaan dan Persatuan Bangsa Indonesia

Masbukin

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

e-mail: masbukin@uin-suska.ac.id

Saifullah

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

e-mail: saifullah@uin-suska.ac.id

Rhonny Riansyah

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

e-mail: rhonny.riansyah@gmail.com

Abstrak:

Tulisan ini, bertujuan mendeskripsikan moderasi beragama dan Pancasila sebagai pilar penting dalam kebhinekaan dan persatuan di Indonesia. Warga Indonesia yang sangat beragam, disatu sisi mendorong akan kekuatan bangsa, namun di sisi lainnya, akan mendorong terjadinya konflik dan permusuhan. Artikel ini, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui library atau dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama dan Pancasila adalah dua pilar utama yang menjaga kebhinekaan dan persatuan bangsa Indonesia. Moderasi beragama mengajarkan pentingnya toleransi dan menghargai perbedaan, sementara Pancasila memberikan landasan nilai yang kuat untuk membangun masyarakat yang adil, bersatu, dan sejahtera.

Kata Kunci: *budaya melayu, madrasah, pekanbaru*

Abstract:

This paper aims to describe religious moderation and Pancasila as important pillars of diversity and unity in Indonesia. Indonesia's diverse citizens, on the one hand, encourage the strength of the nation, but on the other hand, will encourage conflict and hostility. This article uses a qualitative research approach with descriptive research. Data is collected through library or documentation. The results show that religious moderation and Pancasila are the two main pillars that maintain the diversity and unity of the Indonesian nation. Religious moderation teaches the importance of tolerance and respect for differences, while Pancasila provides a strong value foundation for building a just, united and prosperous society.

Keywords: *malay cultur, madrasa, pekanbaru*

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara yang memiliki beragam suku, agama, ras, dan golongan, memerlukan suatu landasan kuat yang mampu menjaga keharmonisan dan persatuan di tengah perbedaan.¹ Indonesia, sebagai negara dengan

keragaman agama, etnis, dan budaya, memerlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga kerukunan dan harmoni di antara warganya.

Keragaman tersebut, di satu sisi memungkinkan terjadinya berbagai konflik dan

¹ Sahma Nada Afifah Ekaprasetya and Dinie Anggraeni Dewi, 'Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Di Tengah Era Globalisasi', *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022).

kepentingan. Misalnya, laporan yang dilakukan oleh Ulfah Fajarini yang menegaskan bahwa akhir-akhir ini banyak konflik yang terjadi di masyarakat dengan mengatasnamakan agama sebagai alasan utamanya. Dalam penelitiannya, Ulfah menyatakan bahwa dalam lingkup satu agama saja masih sangat sering terjadi konflik antar masyarakat karena dianggap berbeda aliran/madzhab.² Laporan yang disampaikan oleh Yunus menjelaskan bahwa banyak sekali konflik yang mengatasnamakan agama terjadi di Indonesia pada beberapa tahun lalu, diantaranya konflik agama di Poso tahun 1992, konflik Sunni-Syiah di Jawa Timur tahun 2012, konflik agama di Bogor tahun 2011, dan masih banyak lagi konflik-konflik lain yang berdalih agama sebagai penyebab utamanya.³ Konflik-konflik yang terjadi tersebut merupakan dampak dari persatuan dan kesatuan masyarakat heterogen yang telah rapuh. Atas dasar inilah, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah yang muncul, terutama konflik yang terjadi dengan mengatasnamakan agama.⁴

Di antara upaya untuk memperkuat harmoni keragaman itu, adalah dengan peningkatan pemahaman moderasi beragama. Pendekatan ini bertujuan sebagai bingkai dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultural. Kebutuhan terhadap narasi keagamaan yang moderat menjadi sebuah kebutuhan umum bagi warga dunia dan tidak hanya menjadi kebutuhan personal atau kelembagaan semata.

Pada sisi yang lain, Indonesia memiliki ideologi negara yaitu Pancasila. Pancasila di satu sisi, dan Islam pada sisi yang lain dapat hidup dan berkembang, bahkan sangat diperlukan. Demikian pula, konsep Pancasila akan semakin jelas ketika masyarakat menjalankan agamanya masing-

masing. Islam adalah agama universal yang tidak hanya mengatur ibadah kepada Tuhan tetapi juga merupakan pendekatan yang menekankan keseimbangan dan toleransi dalam praktik keagamaan.⁵

Dalam konteks ini, sinergi antara nilai-nilai Al-Qur'an dan Pancasila menjadi sangat relevan. Al-Qur'an, sebagai kitab suci umat Islam, mengajarkan moderasi dan keseimbangan, sementara Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mengandung nilai-nilai yang mendukung kerukunan dan persatuan. Islam adalah agama, sedangkan Pancasila adalah filosofi hidup dalam berbangsa dan bernegara.⁶ Hubungan kebajikan antara sesama makhluk dan alam ciptaan Tuhan. Hubungan antara Islam dan negara sering menjadi perdebatan dalam konteks landasan filosofis negara Pancasila, namun bagaimana sebenarnya hubungan antara Islam dan Pancasila?

Pancasila merupakan sistem nilai yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara dan ideologi nasional, Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Kedudukannya sebagai ideologi bangsa menjadikan Pancasila visi untuk masa depan kehidupan berbangsa serta cita-cita normatif bagi bangsa Indonesia. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila dipandang sebagai filosofische grandslag dan weltanschauung atau pandangan hidup bangsa Indonesia.⁷

Kedudukannya sebagai falsafah dasar negara menjadikan Pancasila sumber hukum tertinggi yang mengharuskan setiap peraturan atau produk hukum di Indonesia memuat nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Pancasila setidaknya mengandung lima nilai utama pada setiap silanya, yaitu nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan,

² Ulfah Fajarini, 'Potret Konflik Keagamaan Masyarakat Tangerang Banten Dan Resolusi Konflik Berbasis Multikulturalisme Dalam Islam', *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 14, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v14i2.76>.

³ Firdaus M. Yunus, 'Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya', *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 16, no. 2 (2014).

⁴ Anwar Firmansyah and Tiffany Setyo Pratiwi, 'Agama Dan Pembangunan: Beragam Pandangan Dalam Melihat Keberkaitan Agama Terhadap Proses Pembangunan Dan Modernisasi', *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 15, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.26593/jihi.v15i1.2966.1-12>.

⁵ Asep Mahpudz, 'Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Negara, Membumikan Pancasila Untuk Kelangsungan Hidup Bangsa Indonesia', *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III* 1, no. 1 (2017).

⁶ Mustaqim Pabbajah, Ratri Nurina Widyanti, and Widi Fajar Widyatmoko, 'Membangun Moderasi Beragama', *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 13, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.30739/darussalam.v13i1.1304>.

⁷ Puji Ayu Handayani and Dinie Anggraenie Dewi, 'Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara', *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1439>.

Musyawaharah atau Kedaulatan Rakyat, dan Keadilan Sosial.

Gambaran di atas, menegaskan bahwa dua pilar utama yang menjadi penopang bagi bangsa ini adalah moderasi beragama dan Pancasila. Moderasi beragama mengacu pada sikap dan perilaku beragama yang inklusif, toleran, dan menghormati keberagaman.⁸ Sementara itu, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, menawarkan nilai-nilai yang menjunjung tinggi kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Artikel ini akan mengulas bagaimana moderasi beragama dan Pancasila berperan penting dalam menjaga kebhinekaan dan persatuan Indonesia.

Metode

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis literatur dan dokumen, serta studi kepustakaan yang mengacu pada berbagai referensi dari artikel jurnal. Sumber data utama meliputi buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi yang terkait dengan moderasi beragama, dan Pancasila. Proses analisis terdiri dari tiga tahap: *Pertama*, pengumpulan data di mana berbagai literatur diidentifikasi dan dikumpulkan; *Kedua*, analisis konten di mana data dianalisis untuk menemukan konsep dan nilai-nilai moderasi dalam Al-Qur'an dan Pancasila; dan *Ketiga*, sintesis di mana temuan dianalisis secara menyeluruh untuk menunjukkan bagaimana nilai-nilai dari kedua sumber ini dapat disinergikan guna mendukung moderasi beragama.

Hasil dan Pembahasan

Moderasi Beragama: *Definisi dan Implementasi*

Moderasi beragama adalah sikap tengah-tengah yang menghindari ekstremisme dalam beragama. Sikap ini mengajak umat beragama untuk mengedepankan toleransi, menghargai perbedaan, dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan konflik antarumat beragama. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi semangat keagamaan, melainkan menempatkan

agama sebagai sumber inspirasi untuk hidup damai dan harmonis di tengah perbedaan.

Secara umum, alasan moderasi beragama perlu diterapkan khususnya di Indonesia adalah karena keragaman dalam beragama itu niscaya, tidak mungkin dihilangkan. Jika dielaborasi lebih lanjut ada tiga alasan utama mengapa moderasi beragama perlu diterapkan:⁹

Pertama, moderasi beragama menjadi cara untuk mengembalikan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, dan agar agama benar-benar berfungsi menjaga harkat dan martabat manusia; *Kedua*, moderasi agama penting untuk menyelamatkan peradaban manusia agar tidak musnah akibat konflik berlatar belakang agama; *Ketiga*, khusus dalam konteks Indonesia moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan dalam merawat keindonesiaan. Indonesia bukan negara agama, namun juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya.¹⁰

Dalam lingkup pendidikan Islam, alasan penting moderasi beragama perlu dikuatkan adalah karena pemahaman keagamaan memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan dengan upaya untuk menanggulangi munculnya pemikiran keagamaan konservatif yang masih enggan menerima relitas keragaman dan perbedaan. Untuk itu moderasi beragama hadir sebagai narasi penyeimbang untuk menjembatani kemunculan wacana-wacana paham keagamaan yang membawa paham radikal, ekstrem, dan intoleran.¹¹

Muhammad Quraish Shihab mengungkapkan bahwa moderasi beragama (*wasathiyah*) bukan sikap yang tidak teguh pendirian dalam menghadapi sesuatu, bukan juga sikap yang mengatur urusan perorangan melainkan juga urusan setiap kelompok, masyarakat, dan negara.¹²

Menurut Nasaruddin Umar moderasi beragama merupakan sikap yang mengarah pada pola hidup berdampingan dalam kemajemukan dan keberagaman dalam beragama dan

⁸ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Litbang Kemenag RI, 2019).

⁹ Agus Akhmadi, 'Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia', *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019).

¹⁰ Paelani Setia, 'Moderasi Beragama Dan Perdamaian', *Toleransi Dan Perdamaian Di Masyarakat Multikultural*, 2022.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, h. 1-2

¹² Mohamad Fahri and Ahmad Zainuri, 'Moderasi Beragama Di Indonesia', *Intizar* 25, no. 2 (2019).

bernegara.¹³ Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ali Muhammad Ash-Shallabi, di mana beliau memaknai moderasi beragama sebagai wasathiyah adalah hubungan yang melekat antara makna khairiyah dan banyiah baik yang bersifat inderawi dan maknawi.

Moderasi beragama dipahami sebagai sebuah pemahaman keagamaan yang mengambil posisi tengah (netral) tidak condong ke kiri maupun ke kanan. Dalam konteks Islam wasathiyah pemahaman ini mengandung prinsip keagamaan yang mengarah pada kehidupan yang seimbang dalam mengamalkan ajaran Islam. Karena mengutamakan pemahaman keagamaan yang seimbang dan adil, maka indikatornya akan tampak jika paham keagamaan tersebut searah dengan penerimaannya terhadap nilai budaya dan kebangsaan.

Berdasarkan realitas tersebut, indikator moderasi beragama dapat dirumuskan sebagai berikut: *Pertama*, Komitmen Kebangsaan. Komitmen kebangsaan adalah salah satu indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana ekspresi dan cara pandang keagamaan seseorang ataupun kelompok terhadap ideologi kebangsaan. Yang paling utama dalam hal ini yaitu terletak pada komitmen dalam menerima Pancasila sebagai dasar dalam bernegara.¹⁴

Persoalan komitmen kebangsaan ini sangat penting untuk diperhatikan ketika muncul pemahaman baru keagamaan yang tidak akomodatif terhadap ideologi kebangsaan. Orientasi, gerakan dan pemikiran keagamaan yang seperti ini memiliki cita-cita untuk mendirikan negara dengan sistem khilafah, daulah Islamiyyah maupun imamah, yang mana hal ini berseberangan dengan prinsip negara dan bangsa Indonesia.

Dalam hal inilah komitmen kebangsaan menjadi penting adanya sebagai salah satu indikator moderasi beragama, guna menjauhkan individu maupun kelompok masyarakat dari

ideologi yang ingin mendirikan sebuah negara diluar sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila.

Kedua, Toleransi. Toleransi adalah sikap memberi ruang sekaligus tidak mengusik orang lain ketika mengekspresikan keyakinannya ataupun menyampaikan pendapatnya meskipun pendapat tersebut berbeda dengan apa yang diyakini oleh kita.¹⁵

Dalam kehidupan demokrasi toleransi menjadi urgen yaitu ketika menghadapi berbagai tantangan yang muncul karena adanya perbedaan. Dalam konteks yang lebih luas, toleransi tidak hanya berhubungan dengan keyakinan beragama, namun juga mengarah pada perbedaan, ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual, budaya, dan sebagainya.

Dengan demikian, indikator moderasi beragama terkait toleransi merupakan sebuah kemampuan dalam menunjukkan ekspresi dan sikap keagamaan untuk menghormati perbedaan yang terjadi di tengah masyarakat.

Ketiga, Anti Kekerasan dan Radikalisme. Radikalisme dan kekerasan dalam konteks moderasi beragama dianggap muncul sebagai akibat dari kesalahpahaman dalam memahami agama, dalam hal ini agama cenderung diartikan dalam makna yang sempit. Akibat kesalahpahaman dalam memahami agama ini akan terbentuk sikap dan ekspresi yang cenderung ekstrim, ingin melakukan perubahan total dalam kehidupan politik dan masyarakat dengan menggunakan cara kekerasan baik fisik maupun nonfisik. Faktor lain yang menyebabkan terbentuknya sikap radikalisme adalah pemahaman mengenai keagamaan dengan prinsip revivalisme yaitu ingin mendirikan negara Islam (khilafah, imamah, daulah Islamiyyah, dan sebagainya).

Dalam hal ini, tidak memungkirkan dari berbagai kelompok yang memiliki pemahaman seperti ini

¹³ I Hanafi and M Amril, 'Seperti Diabaikan: Isu Gender Dalam Moderasi Beragama', *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 4, no. 01 (2022); Fauziah Nurdin, 'Moderasi Beragama Menurut Al-Qur'an Dan Hadist', *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 18, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.22373/jim.v18i1.10525>.

¹⁴ Fransiskus Visarlan Suwarni and Anselmus D. Atasoge, 'Komitmen Kebangsaan Mahasiswa Stp Reinha Melalui Ritual Keagamaan Dalam Spirit AYD 2017',

JURNAL REINHA 12, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.56358/ejr.v12i2.82>.

¹⁵ Imam Hanafi, 'Teologi Toleransi; Dari Toleransi Recognize Menuju Toleransi Nilai', *Progresiva: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.22219/progresiva.v8i2.11041>; Imam Hanafi, 'Rekonstruksi Makna Toleransi', *Toleransi* 9, no. 1 (2017).

memiliki rasa benci secara berlebihan terhadap kelompok lain yang memiliki pemahaman yang berbeda dari kelompoknya, bahkan menganggapnya musuh dalam keimanan yang berbahaya dan saling mengkafirkan pada kelompok seiman yang mengakui keberagaman dan menghormati kepercayaan dari agama lain.

Oleh karena itu indikator moderasi beragama dalam hubungannya dengan paham radikalisme terletak pada ekspresi dan sikap keagamaannya yang adil dan seimbang, memahami dan menghormati realitas perbedaan nyata yang ada di tengah masyarakat.

Keempat, Akomodatif terhadap budaya local. Perilaku dan praktik keagamaan yang akomodatif terhadap budaya dan tradisi lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana ia bersedia untuk menerima praktik keagamaan yang mengakomodasi budaya dan tradisi lokal. Seseorang yang memiliki sikap moderat cenderung bersikap ramah terhadap budaya dan tradisi lokal dalam sikap keagamaannya, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama.¹⁶

Ciri-ciri pemahaman agama yang tidak kaku adalah kesediaan untuk menerima perilaku dan praktik yang tidak hanya menekankan pada kebenaran paradigma keagamaan yang normatif, tapi juga paradigma kontekstualis yang positif.

Dalam pelaksanaannya, moderasi beragama dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

Pertama, Pendidikan Agama yang Inklusif. Kurikulum pendidikan agama harus mengajarkan tentang pentingnya menghormati agama lain dan mengenal kebhinekaan. Dengan pemahaman yang benar, generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang toleran dan menghargai perbedaan.¹⁷

Di lingkungan madrasah misalnya implementasi moderasi beragama terinsersi ke dalam mata pelajaran pendidikan agama islam (PAI) sebagaimana Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 183 tahun 2019. Sementara di lingkungan sekolah umum menjadi wewenang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang secara praktis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan di daerah-daerah, namun hal ini tetap berelasi dengan Kementerian Agama melalui mata pelajaran PAI yang mengacu pada KMA RI nomor 211 tahun 2011 tentang pedoman pengembangan standar nasional PAI di sekolah yang telah dikembangkan dan disesuaikan dengan kurikulum 2013.¹⁸

Kemudian di lingkungan pesantren dan madrasah diniyah (madin) implementasi moderasi beragama dilakukan melalui pembelajaran ilmu-ilmu keislaman dengan metode tradisional khas pesantren dan madin.²⁰ Kemudian di lingkungan perguruan tinggi, baik perguruan tinggi keagamaan islam (PTKI) maupun perguruan tinggi umum (PTU) juga mutlak adanya insersi muatan moderasi beragama dalam pembelajarannya. Implementasi moderasi beragama di PTKI didasarkan pada keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) nomor 102 tahun 2019, atas dasar regulasi ini mahasiswa PTKI mendapatkan pendidikan keislaman yang mendalam sesuai program studi masing-masing.¹⁹

Sementara di lingkungan PTU persoalan moderasi beragama harus lebih diperhatikan, sebab selain faktor keterbatasan mahasiswa dalam memperoleh materi pendidikan islam, mahasiswa juga banyak memperoleh pengaruh dari luar, hal ini membuat mahasiswa banyak yang memiliki paham anti demokrasi serta masih mempertanyakan dan meragukan dasar negara.²⁰

¹⁶ Asmaul Husna and Febriyanti Febriyanti, 'Sikap Keagamaan Moderat Nahdlatul Ulama (NU) Dan Komitmennya Dalam Mempertahankan Empat Pilar Kebangsaan', *Seminar Nasional PKn UNNES* 1, no. 1 (2017).

¹⁷ Agus Muhammad and Sigit Muryono, *Jalan Menuju Moderasi Modul Penguatan Moderasi Beragama Bagi Guru, Cendikia.Kemenag.Go.Id* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2021).

¹⁸ Hendra Harmi, 'Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Moderasi Beragama', *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 7, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.29210/30031757000>.

¹⁹ Nafik Muthohirin and Mohammad Kamaludin, 'The Tradition of Islamic Moderation in Pesantren: Case Study in Pesantren Muhammadiyah Karangasem Lamongan-East Java In', *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* 6, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.389>.

²⁰ Sasmi Selvia, Munawar Rahmat, and Saepul Anwar, 'Tingkat Pemahaman Moderasi Beragama Mahasiswa Di Perguruan Tinggi Umum Dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri', *Intizar* 28, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.19109/intizar.v28i1.11667>.

Kedua, Dialog Antarumat Beragama: Dialog antarumat beragama penting untuk membangun saling pengertian dan menghilangkan prasangka. Melalui dialog, umat beragama dapat berbagi pandangan dan mencari solusi bersama atas berbagai masalah sosial.

Secara ideal, tidak satupun umat manusia di dunia ini yang menginginkan penindasan, kekerasan, peperangan atau tindakan kejahatan lainnya. Namun tidak dapat dihindari bahwa semua tindakan itu sudah, sedang dan pasti akan terjadi, mengingat fitrah manusia diciptakan dalam bentuk beragam baik dari segi suku, bahasa, warna kulit, sampai agama sekalipun.

Di antara keberagaman yang disebutkan, agama merupakan hal yang paling sensitif untuk dibicarakan, karena selain ajaran yang dianut hampir seluruh penduduk bumi, agama juga dapat dijadikan untuk melancarkan kepentingan kelompok tertentu. Ketika agama telah dijadikan sebagai alat kepentingan, maka saat itu pula agama menjadi pemicu kebencian, kekerasan, dan tidak tertutup kemungkinan terjadinya peperangan. Meminjam istilah Charless Kimball yang dikenal dengan “agama korup”. Maka dari itu, yang mesti dilakukan bukanlah menghilangkan agama tersebut yang dianggap sebagai pemicu konflik, akan tetapi mengelola konflik tersebut sebagai suatu antitesis keberagaman yang menjadi fitrah manusia.

Ketiga, Peran Tokoh Agama: Tokoh agama memiliki peran penting dalam menyebarkan pesan-pesan moderasi. Mereka harus menjadi teladan dalam mengedepankan sikap toleran dan inklusif. Dalam konteks ini, tokoh agama memiliki peran sebagai perekat kerukunan antar umat beragama. Kerukunan umat beragama adalah suatu hal yang sangat baik yang perlu dipelihara dalam masyarakat dengan cara bagaimana kita saling membantu, saling menerima, saling menghormati serta bagaimana kita saling menghargai satu dengan lainnya. Sehingga kehadiran tokoh agama dalam masyarakat sangat diperhitungkan dan bagaimana agama saling melibatkan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan.²¹

Sebagai mana yang telah di ungkapkan oleh Ahmat Ali Haidlor dalam bukunya yang mengatakan bahwa “kerukunan berarti mengatasi perbedaan-perbedaan, bekerjasama, saling menerima, hati tenang dan hidup harmonis. Tujuan daripada kerukunan adalah untuk mengajak masyarakat bagaimana hidup dalam lingkungan yang majemuk tanpa memunculkan konflik atau melakukan sesuatu hal yang memicu munculnya perpecahan dalam masyarakat. Dalam situasi seperti inilah akan muncul sikap saling menerima serta saling menghormati antar umat beragama sehingga kehidupan bermasyarakat akan tentram dan damai. Dengan ini kerukunan yang sudah terjalin dalam masyarakat kaduaja adalah wujud dari apa yang sudah di sampaikan oleh tokoh agama serta hasil daripada binaan-binaan didalam kelompok keagamaan yang di lakukan oleh tokoh agama masing-masing.

Sesuai dengan pemaparan narasumber bahwa tokoh agama harus mampu memosisikan diri dalam masyarakat sebagai teladan atau panutan bagi semua orang, kemudian bagaimana ia mengajak serta mendorong umat beragama untuk saling memahami, saling menghormati serta saling menerima sehingga kerukunan dalam masyarakat itu dapat terjalin, dan juga bagaimana membina kekeluargaan serta menjalin komunikasi atau dialog dengan baik untuk lebih mempererat kekeluargaan. Sebab salah satu penunjang terciptanya suatu kerukunan dalam masyarakat adalah sikap kekeluargaan, sehingga sangat penting untuk membangun relasi dan komunikasi atau dialog antar umat beragama.

Keempat, Kebijakan Pemerintah: Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang mendukung moderasi beragama, seperti undang-undang yang melindungi kebebasan beragama dan mencegah diskriminasi berdasarkan agama. Misalnya, dalam hal pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dengan memperkuat multicultural, yang berhubungan dengan sikap toleransi antar umat beragama. Komponen yang menyangkut tujuan ini, pemerintah di antaranya telah melakukan yaitu: *Pertama*; Undang -Undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. *Kedua*; pasal 12 ayat 1 yaitu “*setiap siswa pada setiap satuan pendidikan*

²¹ Samuel Samuel and Esther Epin Tumonglo, “Toleransi: Peran Tokoh Agama Sebagai Perekat Kerukunan Umat Beragama”, *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-*

Agama 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.22373/arj.v3i1.14734>.

berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan agama yang diyakininya dan diajarkan oleh guru yang seagama dengan siswa". Ketiga, pengembangan ketahanan masyarakat lokal dan pengembangan masyarakat dengan dibekali wawasan pendidikan multikultural. Keempat, berprinsip pada demokrasi, keadilan dan kesejahteraan. Kelima, menjunjung tinggi kemanusiaan, kedamaian dan kebersamaan; dan Keenam: mengembangkan sikap mengakui, menghargai dan menerima keragaman.

Pancasila: Fondasi Kebangsaan Indonesia

Pancasila, yang terdiri dari lima sila, adalah dasar negara Indonesia dan pandangan hidup yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Lima sila tersebut adalah: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pancasila mengajarkan nilai-nilai yang sangat relevan untuk menjaga kebhinekaan dan persatuan bangsa. Berikut adalah bagaimana masing-masing sila Pancasila berkontribusi dalam moderasi beragama dan persatuan:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa:

Sila pertama ini mengakui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, namun dalam keberagaman agama. Sila ini mengajarkan pentingnya menghormati dan menghargai keyakinan agama orang lain, yang merupakan dasar dari moderasi beragama. Makna sila pertama Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa, ialah: pertama, pengakuan, kepercayaan, dan keyakinan. Makna yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah pengakuan dari seluruh Bangsa Indonesia tentang adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta dan segala yang ada di dalamnya. Kedua, taat dalam beragama. Makna sila pertama Pancasila yang berikutnya, ialah menciptakan sikap individual agar senantiasa taat dalam menjalankan agama, sebagaimana

yang telah diatur dalam ajaran-ajaran yang telah diperintahkan. Aturan yang dibuat ini dilakukan dengan tujuan untuk mengendalikan diri atas sikap manusia yang tidak terbatas adanya. Ketiga, kebebasan dalam beragama.²²

Makna sila pertama yang selanjutnya adalah memberikan pengakuan serta kebebasan. Jadi, setiap warga negara secara individu maupun masyarakat berhak memeluk agama yang dikehendakinya dan kemudian mengamalkan ajaran agama yang ia yakini dan telah ditetapkan dalam hukum agama dan UUD. Makna sila pertama yang keempat ialah tidak adanya unsur memaksa dan paksaan memeluk agama kepada orang lain.

Jadi, setiap individu tidak boleh memaksa kelompok ataupun perorangan untuk ikut masuk agama yang dianut seseorang tersebut. Itulah mengapa, semuanya tergantung dari keyakinan atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat serta dilegalitaskan dalam segi hukum negara. Makna sila pertama yang terakhir ialah menciptakan atau membangun pola hidup saling menghargai dan menghormati antarumat beragama dan menjauhi sikap ketidakadilan atau membeda-bedakan (diskriminatif) pada ajaran agama lain, meski bertentangan dengan keyakinannya.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:

Sila kedua menekankan pada perlakuan yang adil dan beradab terhadap sesama manusia, tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau ras. Ini sejalan dengan prinsip moderasi beragama yang mengedepankan sikap adil dan menghargai perbedaan.²³

Hak asasi manusia merupakan perwujudan dari sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak asasi sangat di hormati dan dijunjung tinggi oleh nilai-nilai pancasila khususnya nilai sila ke dua, yang mana rasa sikap toleransi dan saling menghormati merupakan kebiasaan bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia.hak asasi manusia

²² Samosir Osbin, Tinambunan Laurentius, and Septiandry Robertus, 'Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan (Tinjauan Filosofis Atas Demokrasi Dasi Sila IV Pancasila)', Seminar Nasional Filsafat Teologi, 2023.

²³ Hadi Rianto, 'Implementasi Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Di Lingkungan Sekolah', *SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial* 3, no. 1 (2016).

sebagai perwujudan sila yang kedua menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukannya yang sama. Setiap manusia mempunyai kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan undang-undang.

Hak asasi manusia sebagai perwujudan sila yang kedua menempatkan manusia pada mana ia harus mendapatkan kedudukan yang sama terutama di bidang hukum, karena negara Indonesia merupakan negara hukum. Seperti apa yang dijelaskan, sebagai negara hukum hak asasi manusia sangat dihargai dan erlu ditegakkan di dalam pelaksanaan kenegaraan. Penegakan hak asasi manusia apabila terealisasi akan mewujudkan nilai dari sila yang kedua. Apabila penegakan hak asasi manusia terealisasi maka kehidupan masyarakat Indonesia dapat dipastikan akan sejahtera dan tidak akan ada keresahan yang timbul karena adanya pelanggaran hak asasi manusia.

3. Persatuan Indonesia:

Sila ketiga menggarisbawahi pentingnya persatuan di tengah keberagaman. Persatuan ini bisa terwujud jika setiap warga negara mengedepankan sikap moderasi dalam beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan.

Persatuan dalam bingkai kerukunan yang terjalin antarumat beragama maupun suku, bangsa dan antar golongan merupakan kerinduan manusia modern saat ini dalam kehidupan masyarakat multikultural. Kerukunan yang tercipta dalam kemajemukan tersebut merupakan sebuah kondisi di mana masyarakat sosial yang damai dan sejahtera sebagai bagian ketergantungan manusia sosial yang saling melengkapi.

Namun tidak dapat dipungkiri dalam lapisan masyarakat majemuk yang sangat plural, adanya perbedaan suku, bahasa, budaya, adat-istiadat, terlebih-lebih perbedaan ajaran dan agama, sangat rawan menimbulkan konflik horizontal dan pertentangan diantara masyarakat. Terlebih sikap intoleransi dan saling bermusuhan, gesekan-gesekan dari perbedaan paham, maupun kompetisi dalam penyebarluasan paham agama, dapat menimbulkan api pertikaian.

Konflik tersebut dapat juga disebabkan adanya tingkat keragaman bangsa Indonesia yang tinggi yang tidak dibarengi oleh nilai kerukunan dalam persatuan. Hal itu menjadi pemicu seperti sumbu yang mudah tersulut oleh konfrontasi-konfrontasi bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA).

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Sila keempat mengajarkan pentingnya musyawarah dan demokrasi dalam mengambil keputusan. Hal ini mencerminkan semangat inklusivitas dan partisipasi semua elemen masyarakat, termasuk dalam urusan keagamaan.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Sila kelima menekankan pada pentingnya keadilan sosial. Dalam konteks moderasi beragama, keadilan sosial ini berarti memberikan hak yang sama kepada semua warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya.

Hubungan Simbiosis antara Moderasi Beragama dan Pancasila

Moderasi beragama dan Pancasila memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mendukung. Pancasila memberikan kerangka nilai yang mendukung sikap moderasi dalam beragama, sementara moderasi beragama memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.

1. Penguatan Identitas Nasional: Moderasi beragama membantu memperkuat identitas nasional yang berlandaskan Pancasila. Dengan bersikap moderat, warga negara dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan menjaga persatuan di tengah keberagaman.
2. Pencegahan Konflik Sosial: Moderasi beragama dapat mencegah konflik sosial yang sering kali dipicu oleh fanatisme dan ekstremisme agama. Pancasila, dengan nilai-nilai kemanusiaan dan persatuannya, memberikan landasan untuk menyelesaikan perbedaan secara damai dan berkeadilan.
3. Membangun Toleransi: Pancasila dan moderasi beragama sama-sama mengajarkan pentingnya toleransi. Toleransi ini menjadi

kunci dalam membangun masyarakat yang harmonis dan damai.

4. Peningkatan Kualitas Hidup Beragama: Dengan moderasi beragama, kualitas hidup beragama masyarakat Indonesia dapat meningkat. Masyarakat yang moderat akan lebih terbuka dalam menerima perbedaan dan lebih fokus pada esensi dari ajaran agama yang mengedepankan perdamaian dan kasih sayang.

Indonesia adalah negara dengan keragaman yang luar biasa, baik dari segi etnis, budaya, maupun agama. Dalam konteks ini, moderasi beragama dan Pancasila memainkan peran krusial dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial. Keduanya memiliki hubungan simbiosis yang kuat, di mana masing-masing saling mendukung dan memperkuat dalam menciptakan masyarakat yang damai dan toleran.

Moderasi beragama adalah pendekatan yang menekankan keseimbangan, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan dalam beragama. Ini mencakup sikap inklusif dan penolakan terhadap ekstremisme dan radikalisme. Dalam konteks Indonesia yang pluralistik, moderasi beragama sangat penting untuk menghindari konflik sektarian dan mempromosikan kohesi sosial.

Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa. Moderasi beragama dan sila pertama memiliki hubungan yang sangat erat. Pancasila mengakui keberadaan Tuhan dan kebebasan beragama, yang sejalan dengan prinsip moderasi beragama yang menghormati dan menghargai keyakinan setiap individu. Ini membantu mencegah dominasi satu agama atas yang lain dan menghindari konflik antarumat beragama.

Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Moderasi beragama mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia dan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Ini sejalan dengan sila kedua Pancasila yang menekankan pada keadilan dan kemanusiaan. Bersama-sama, keduanya mendorong perlakuan yang adil dan beradab terhadap semua individu, tanpa memandang agama mereka.

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia. Salah satu tujuan utama moderasi beragama adalah menciptakan harmoni dan persatuan di tengah keragaman. Hal ini langsung mendukung sila ketiga Pancasila yang mengedepankan persatuan bangsa. Dengan moderasi beragama, potensi perpecahan akibat perbedaan agama dapat diminimalisir, sehingga tercipta persatuan yang kokoh.

Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Moderasi beragama mendorong dialog dan musyawarah sebagai cara untuk menyelesaikan perbedaan. Ini sangat sejalan dengan sila keempat Pancasila yang mengedepankan demokrasi dan musyawarah mufakat. Dengan demikian, moderasi beragama memperkuat praktik demokrasi di Indonesia.

Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Moderasi beragama mendukung keadilan sosial dengan menolak segala bentuk ekstremisme dan diskriminasi yang dapat mengakibatkan ketidakadilan. Ini mendukung sila kelima Pancasila yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hubungan simbiosis antara moderasi beragama dan Pancasila menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan bangsa. Moderasi beragama mempromosikan nilai-nilai yang sejalan dengan Pancasila, seperti toleransi, keadilan, dan persatuan. Di sisi lain, Pancasila menyediakan kerangka hukum dan moral yang mendukung praktik moderasi beragama. Dengan demikian, keduanya saling menguatkan dalam menjaga integritas bangsa dan mencegah konflik yang dapat merusak tatanan sosial.

Tantangan dalam Implementasi Moderasi Beragama dan Pancasila

Meskipun moderasi beragama dan Pancasila memiliki banyak nilai positif, implementasinya di lapangan tidak selalu mudah. Ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi:

1. Ekstremisme dan Radikalisme: Salah satu tantangan terbesar adalah meningkatnya ekstremisme dan radikalisme. Ideologi-ideologi ini bertentangan dengan prinsip moderasi dan

nilai-nilai Pancasila, dan dapat memecah belah masyarakat.

2. Politik Identitas: Penggunaan politik identitas oleh kelompok-kelompok tertentu untuk meraih kekuasaan dapat mengancam persatuan dan keutuhan bangsa. Politik identitas sering kali mengabaikan nilai-nilai moderasi dan Pancasila.
3. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi: Ketimpangan sosial dan ekonomi yang tinggi dapat menimbulkan ketidakpuasan dan keresahan sosial, yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ekstremis untuk menyebarkan ideologi radikal.
4. Kurangnya Pemahaman tentang Pancasila dan Moderasi Beragama: Masih banyak masyarakat yang kurang memahami nilai-nilai Pancasila dan pentingnya moderasi beragama. Hal ini membutuhkan upaya sosialisasi dan pendidikan yang lebih intensif.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Penguatan Pendidikan Pancasila dan Moderasi Beragama: Pendidikan tentang Pancasila dan moderasi beragama harus diperkuat di semua jenjang pendidikan. Kurikulum yang mengajarkan nilai-nilai ini harus dikembangkan dan diimplementasikan dengan baik.
2. Kampanye Publik: Kampanye publik yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya moderasi beragama dan nilai-nilai Pancasila harus digalakkan. Kampanye ini bisa dilakukan melalui media massa, media sosial, dan kegiatan-kegiatan komunitas.
3. Dialog dan Kerjasama Antarumat Beragama: Dialog dan kerjasama antarumat beragama harus terus ditingkatkan. Forum-forum dialog dapat menjadi wadah untuk saling memahami dan menghilangkan prasangka.
4. Kebijakan yang Mendukung Keberagaman dan Keadilan: Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang mendukung keberagaman dan keadilan bagi semua warga negara. Kebijakan ini harus memastikan bahwa setiap warga

negara mendapatkan hak yang sama tanpa diskriminasi.

5. Peran Aktif Masyarakat: Masyarakat harus berperan aktif dalam menjaga nilai-nilai Pancasila dan moderasi beragama. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis.

Kesimpulan

Moderasi beragama dan Pancasila adalah dua pilar utama yang menjaga kebhinekaan dan persatuan bangsa Indonesia. Moderasi beragama mengajarkan pentingnya toleransi dan menghargai perbedaan, sementara Pancasila memberikan landasan nilai yang kuat untuk membangun masyarakat yang adil, bersatu, dan sejahtera. Meskipun ada banyak tantangan dalam implementasinya, dengan strategi yang tepat dan kerjasama semua pihak, moderasi beragama dan Pancasila dapat terus menjadi penjaga kebhinekaan dan persatuan Indonesia.

Dalam keragaman Indonesia, moderasi beragama dan Pancasila memiliki hubungan simbiosis yang vital. Moderasi beragama memperkuat nilai-nilai Pancasila dengan mengajarkan toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan, sementara Pancasila memberikan landasan yang kokoh bagi praktik moderasi beragama. Bersama-sama, keduanya menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan bersatu, yang merupakan fondasi bagi keberlanjutan dan kemajuan Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Akhmadi, Agus. 'Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia'. *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019).
- Ekaprasetya, Sahma Nada Afifah, and Dinie Anggraeni Dewi. 'Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Di Tengah Era Globalisasi'. *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022).
- Fahri, Mohamad, and Ahmad Zainuri. 'Moderasi Beragama Di Indonesia'. *Intizar* 25, no. 2 (2019).
- Fajarini, Ulfah. 'POTRET KONFLIK KEAGAMAAN MASYARAKAT TANGERANG BANTEN DAN RESOLUSI KONFLIK BERBASIS MULTIKULTURALISME DALAM ISLAM'. *Al-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam* 14, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v14i2.76>.
- Firmansyah, Anwar, and Tiffany Setyo Pratiwi. 'Agama Dan Pembangunan: Beragam Pandangan Dalam Melihat Keberkaitan Agama Terhadap Proses Pembangunan Dan Modernisasi'. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 15, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.26593/jihi.v15i1.2966.1-12>.
- Fransiskus Visarlan Suwarni, and Anselmus D. Atasoge. 'KOMITMEN KEBANGSAAN MAHASISWA STP REINHA MELALUI RITUAL KEAGAMAAN DALAM SPIRIT AYD 2017'. *JURNAL REINHA* 12, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.56358/ejr.v12i2.82>.
- Hanafi, I, and M Amril. 'Seperti Diabaikan: Isu Gender Dalam Moderasi Beragama'. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 4, no. 01 (2022).
- Hanafi, Imam. 'REKONSTRUKSI MAKNA TOLERANSI'. *Toleransi* 9, no. 1 (2017).
- . 'Teologi Toleransi; Dari Toleransi Recognize Menuju Toleransi Nilai'. *Progresiva: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.22219/progresiva.v8i2.11041>.
- Handayani, Puji Ayu, and Dinie Anggraenie Dewi. 'IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA'. *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1439>.
- Harmi, Hendra. 'Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Moderasi Beragama'. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 7, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.29210/30031757000>.
- Husna, Asmaul, and Febriyanti Febriyanti. 'Sikap Keagamaan Moderat Nahdlatul Ulama (NU) Dan Komitmennya Dalam Mempertahankan Empat Pilar Kebangsaan'. *Seminar Nasional PKn UNNES* 1, no. 1 (2017).
- Kementerian Agama RI. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Litbang Kemenag RI, 2019.
- Mahpudz, Asep. 'Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Negara, Membumikan Pancasila Untuk Kelangsungan Hidup Bangsa Indonesia'. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III* 1, no. 1 (2017).
- Muhammad, Agus, and Sigit Muryono. *Jalan Menuju Moderasi Modul Penguatan Moderasi Beragama Bagi Guru*. Cendikia.Kemenag.Go.Id. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2021.
- Muthohirin, Nafik, and Mohammad Kamaludin. 'The Tradition of Islamic Moderation in Pesantren: Case Study in Pesantren Muhammadiyah Karangasem Lamongan-East Java In'. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* 6, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.389>.
- Nurdin, Fauziah. 'Moderasi Beragama Menurut Al-Qur'an Dan Hadist'. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 18, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.22373/jim.v18i1.10525>.
- Osbin, Samosir, Tinambunan Laurentius, and Septiandry Robertus. 'Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan (Tinjauan Filosofis Atas Demokrasi Dasi Sila IV Pancasila)'. *Seminar Nasional Filsafat Teologi*, 2023.
- Pabbajah, Mustaqim, Ratri Nurina Widyanti, and Widi Fajar Widyatmoko. 'Membangun Moderasi Beragama'. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 13, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.30739/darussalam.v13i1.1304>.
- Rianto, Hadi. 'Implementasi Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Di Lingkungan

- Sekolah?. *SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial* 3, no. 1 (2016).
- Samuel, Samuel, and Esther Epin Tumonglo. 'Toleransi: Peran Tokoh Agama Sebagai Perekat Kerukunan Umat Beragama'. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.22373/arj.v3i1.14734>.
- Selvia, Sasmi, Munawar Rahmat, and Saepul Anwar. 'Tingkat Pemahaman Moderasi Beragama Mahasiswa Di Perguruan Tinggi Umum Dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri'. *Intizar* 28, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.19109/intizar.v28i1.11667>.
- Setia, Paelani. 'Moderasi Beragama Dan Perdamaian'. *Toleransi Dan Perdamaian Di Masyarakat Multikultural*, 2022.
- Yunus, Firdaus M. 'Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya'. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 16, no. 2 (2014).